

**IMPLEMENTASI MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI
SARANA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

TIARA AMALIA RAHMAYANI

NPM 2416041101



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

2.3 Kerangka Berfikir

Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, yang menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) telah mencapai lebih dari 221 juta pengguna. Pemerintah daerah turut memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik untuk menyebarkan informasi pembangunan, mensosialisasikan kebijakan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan masih belum optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas media sosial pemerintah sebagai instrumen pelayanan informasi publik.

Secara normatif, terdapat berbagai regulasi yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan prinsip partisipasi dalam setiap tahap pembangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk dalam bidang pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memperkuat kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

Lokus penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung, khususnya dalam konteks pemanfaatan media sosial resmi pemerintah sebagai sarana publikasi dan ruang interaksi dengan masyarakat. Pada bagian ini, teori manajemen pelayanan publik digunakan sebagai pisau analisis yang menekankan pada tiga pendekatan utama: pendekatan politik (legitimasi dan representasi aspirasi masyarakat), pendekatan manajerial (efektivitas, efisiensi, dan orientasi pada kepuasan masyarakat), serta pendekatan hukum (kepastian hak dan kewajiban masyarakat dalam mengakses layanan).

Di sisi lain, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas media sosial pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi tingkat literasi digital warga,

keterbukaan informasi pemerintah, responsivitas aparat terhadap umpan balik masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya pola komunikasi dua arah yang lebih inklusif melalui media sosial pemerintah, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga aktor aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan, transparansi pemerintahan lebih terjamin, dan kualitas pelayanan publik semakin membaik.

2.3 Kerangka Berfikir

